

## PROGRAM KEJAR PAKET A DALAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF TAHUN 1974-1979

**Indah Wulandari**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Email : [geizha\\_18@yahoo.co.id](mailto:geizha_18@yahoo.co.id)

**Sumarno**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Pada tahun 1974 penduduk Indonesia yang mengalami buta huruf sebesar 32 %. Salah satu masalah ini dikarenakan banyaknya anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah. Hal yang menarik untuk dibahas mengenai Kejar Paket adalah pendidikan ini dapat mengatasi angka putus sekolah dan angka buta huruf di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Program ini digunakan sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak melakukan pendidikan formal. Program Kejar Paket A ini ternyata dapat memberikan pengaruh besar dalam rencana 10 tahun kebijakan pendidikan dalam pemberantasan buta huruf. Program ini sangat efektif bagi masyarakat usia sekolah yang tidak dapat bersekolah. Perkembangan program ini ternyata masih tetap digunakan bagi masyarakat yang tidak lulus Ujian Nasional sebagai pendidikan kesetaraan dalam memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Program kejar paket A yang setara dengan Sekolah Dasar ternyata sangat berperan penting dalam pemberantasan buta huruf masa REPELITA II tahun 1974-1979

**Kata kunci** : buta huruf, kejar paket A, pendidikan luar sekolah

### Abstract

*In 1974, Indonesian people that experience of illiterate until 32 %. This one problem because of many people age 7-12 break of school. It is interesting to discuss the Packet is this education can address the dropout rates and illiteracy in Indonesia so as to contribute to the improvement of human resources in the field of education. This program is used as an educational alternative for people who do not do formal education. Packet Program is a program of Non-Formal Education are used as educational equality for students who do not pass the exam in order to proceed to further education. It is interesting to discuss the Packet is this education can not overcome the graduation rate of students so that they can contribute to the improvement of human resources in education. The results showed that the catch-up program package A which is equivalent to Elementary School was very instrumental in the eradication of illiteracy Repelita II year period from 1974 to 1979*

**Keywords** : illiterate, packet A, Non-Formal Education

### PENDAHULUAN

Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah saat ini sudah mulai menarik untuk diminati masyarakat yang tidak bisa bersekolah maupun yang putus sekolah. Alasan tersebut membuat pemerintah lebih meningkatkan sumber daya manusia dengan berbagai cara melalui bidang pendidikan. Pendidikan Luar Sekolah adalah sebuah pendidikan yang bersifat kemasyarakatan dan dapat memberikan perkembangan sosial, kultural, bahasa serta keterampilan untuk

mengembangkan diri. Pendidikan ini berguna bagi masyarakat yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah dan ditujukan bagi masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, dan putus sekolah.

Kebijakan pendidikan Luar sekolah saat ini sudah digunakan untuk masyarakat yang tidak lulus ujian nasional ataupun yang putus sekolah. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 BAB II pasal 2 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengacu pada pendidikan luar sekolah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal

dan Informal (Dirjen PNFI) untuk mengembangkan program Kecakapan Hidup (*Life Skills*) pada pendidikan kesetaraan.<sup>1</sup> Kebijakan pendidikan luar sekolah ini sudah diterapkan pada masa kepemimpinan Soeharto dengan program Kejar Paket A sebagai awal pelaksanaannya.

Kebijakan dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru adalah pemberantasan buta huruf dengan salah satu programnya yaitu Pendidikan Luar Sekolah. Surat Keputusan Menteri P dan K nomor 079/0 tahun 1975, tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat adalah menyelenggarakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.<sup>2</sup> Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan potensi seluruh warga masyarakat di luar sekolah. Pola pendekatan pengembangannya dengan mendayagunakan sumber potensi alam, manusiawi, kebudayaan, teknologi, yang berpangkal pada permintaan kebutuhan. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah bekerja sebagai petani sehingga dalam meningkatkan hasil panen maka masyarakat harus bisa terbebas dari buta aksara. Tujuannya yaitu petani bisa mengetahui volume air untuk mengairi sawah, volume pupuk yang digunakan serta banyaknya bibit yang dipakai.

Pemerintah awalnya mengadakan kebijakan pemberantasan buta huruf dengan program kerja dan belajar "program kejar". Sebenarnya pada era kepemimpinan Soekarno yaitu antara tahun 1950-1959 sudah diadakan pemberantasan buta huruf melalui pendidikan-pendidikan formal akan tetapi belum terlaksana dengan baik. Penambahan sekolah memang meningkat akan tetapi dalam standart Internasional anggaran pendidikan rendah sekali. Peristiwa ini dikarenakan adanya inflasi rupiah serta tidak adanya perencanaan yang efektif sehingga mutu pendidikan juga menurun.

Program Kejar Paket A khusus diarahkan kepada masyarakat di luar sekolah dengan memberi pengetahuan dasar.<sup>3</sup> Program itu sendiri merupakan kebijakan pendidikan luar sekolah yang dicanangkan menteri P dan K pada masa kepemimpinan Soeharto.<sup>4</sup> Mendukung kegiatan pemberantasan buta huruf ini pemerintah mengembangkan bahan belajar paket A untuk warga masyarakat yang tidak berkesempatan bersekolah (buta huruf) dan putus sekolah.<sup>5</sup> Bahan belajar paket A sendiri berisi bahan belajar minimum meliputi bidang hidup yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara seperti : pertanian, peternakan, dan perindustrian.

Pejuang pada revolusi fisik setelah proklamasi mulai berjuang dalam bidang pendidikan dengan mengadakan kursus PBH. Usaha PBH semakin terorganisasi setelah kementrian P dan K dalam tahun 1946 membentuk pendidikan masyarakat.<sup>6</sup> Tahun 1951, pemerintah mengadakan rencana 10 tahun kebijakan pendidikan yang bertugas menghabiskan buta huruf di Indonesia.

Pemelekan huruf ini menggunakan pendekatan yang intensif kearah keahlian dalam keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Programnya fleksibel maksudnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu dengan memperhitungkan tujuan langsung. Pidato presiden pada pembukaan persidangan DPR-RI tahun sidang 1978-1979 tanggal 16 Agustus 1978 telah ditegaskan kebijakan pembangunan dalam REPELITA II. Pidato tersebut berisi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan adanya kewajiban belajar.<sup>7</sup> Masa REPELITA II mulai diutamakan sebuah pembaharuan pendidikan selain pendidikan sekolah yaitu program pendidikan luar sekolah hingga awal REPELITA III. Sasaran utamanya yaitu masyarakat buta huruf tanpa batasan usia dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan seperangkat aturan atau prosedur kerja. Setiap disiplin ilmu mempunyai metodologi penelitian yang berbeda-beda. Konteks penelitian ini termasuk dalam disiplin ilmu sejarah dengan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>8</sup>

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Heuristik. Heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti.<sup>9</sup> Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber-sumber, baik primer dan sekunder yang berhubungan dengan tema yang di ambil penulis

Tahapan selanjutnya adalah kritik intern. Kritik intern merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta.<sup>10</sup> Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap validitas data yang sudah didapat dan mengkritisi sumber berkaitan dengan pemberantasan buta huruf dan program Kejar Paket A, sehingga akan diperoleh fakta sejarah

<sup>1</sup> W.P Napitupulu. 1992. "pedoman pendidikan luar sekolah" (Jakarta)hlm. 37

<sup>2</sup> Faisal Sanapiah, 198."Pendidikan Luar Sekolah ". (Surabaya: CV. Usaha Nasional) Hlm, 52

<sup>3</sup>W.P Napitupulu., Op. Cit, hlm 26

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971 kewajiban belajar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, hlm 5

<sup>6</sup>Ary H Gunawan,1986,kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia,(Jakarta:Bina Aksara),Hlm 59.

<sup>7</sup>W.P Napitupulu,1976,kebijakan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan masyarakat untuk tingkat dasar ,(Jakarta), Hlm.6

<sup>8</sup> Louis Gotschak, 1986,Mengerti Sejarah: Edisi Terjemahan, ( Jakarta: UI Press ), hlm 32.

<sup>9</sup> Aminuddin Kasdi, 2005,Memahami Sejarah,( Surabaya. Unesa University Press ), hlm 10.

<sup>10</sup> Ibid.

mengenai peran program Kejar Paket A terhadap pemberantasan buta huruf tahun 1974-1979. Sumber-sumber yang telah didapat lebih menjelaskan kepada pelaksanaan dari program Kejar Paket A sendiri di wilayah Indonesia

Tahapan ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta.<sup>11</sup> Pada tahap ini peneliti mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang telah diperoleh kemudian menganalisis hasil dari penafsirannya. Fakta-fakta sejarah mengenai pemberantasan buta huruf dan program kejar paket A yang sudah diperoleh penulis sehingga dapat dihubungkan antar fakta sejarah mengenai peran program Kejar Paket A dalam pemberantasan buta huruf tahun 1974-1979. Penulis juga telah mencari keterkaitan fakta dengan mencocokkan fakta satu dengan fakta yang lainnya.

Tahapan terakhir yaitu Historiografi. Historiografi merupakan penulisan masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan di daerah pedesaan juga kurang maju jika pendapatan rakyatnya masih di bawah rata-rata nasional.<sup>13</sup> Masyarakat tidak punya uang untuk bersekolah di sekolah-sekolah formal yang di bangun oleh pemerintah. Banyak warga yang masih buta huruf sehingga berakibat pada perekonomian mereka. Masalah pendidikan di Indonesia awalnya di karenakan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat.<sup>14</sup> Pada masa REPELITA II anak usia 7-12 tahun yang setara sekolah dasar  $\pm$  15% tidak dapat bersekolah yang dikarenakan putus sekolah.<sup>15</sup> Untuk lrbih rincinya dapat dilihat sebagai berikut :

Table 1

Usia	1974	1975	1976
7-12	7,1 %	6,9 %	3,9 %
Jumlah penduduk	119.208.229	122.876.657	126.092.181

Prosentase angka putus sekolah tahun 1974-1976

Penerapan pendidikan yang terus-menerus pada pengembangan budaya menimbulkan serangkaian masalah teknis yang kompleks seperti pembangunan pada sarana dan prasarana. Penyelenggaraan kebudayaan dalam rangka pengembangan budaya

<sup>11</sup> Ibid., hlm 11.

<sup>12</sup> Louis Gotschak dalam Aminuddin Kasdi, Ibid.

<sup>13</sup> Sambutan Menteri Mashuri pada peringatan *International Literacy day di gedung KONI* tanggal 8 September 1971 dalam majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971

<sup>14</sup> Ary Gunawan, op. cit, hlm 67

<sup>15</sup> Maftuchah Yusuf, 1985, *program pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan nasional*, (Jakarta), Hlm. 103

Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta dengan aturan tanpa bantuan pemerintah karena pada azasnya pengembangan kebudayaan nasional adalah tanggung jawab perorangan, keluarga, masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

### 1. Pemberantasan Buta Huruf

Membaca merupakan kunci dalam memasuki dunia pengetahuan yang luas. UNESCO menyimpulkan terdapat korelasi yang kuat antara kemampuan membaca dengan peningkatan kerja seseorang. Buta huruf sangat terkait dengan kemiskinan, kebodohan serta ketidakberdayaan masyarakat sehingga diperlukan cara dalam hal pemberantasan buta huruf tersebut . Buta huruf atau buta aksara adalah ketidakmampuan masyarakat dalam membaca. Sedangkan lawan katanya melek huruf atau melek aksara dan bias dikatakan dengan kemampuan membaca.

Angka Melek huruf adalah tolak ukur yang penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Banyak pemikiran yang berpendapat bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis itu lebih mudah daripada melatih orang yang buta huruf, dan umumnya orang melek huruf memiliki status social yang lebih baik.

Tingkat buta aksara masih tinggi dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah dasar (SD), beratnya kondisi geografis Indonesia untuk pergi ke sekolah, munculnya penyandang buta aksara baru, serta pandangan masyarakat akan tidak terlalu mementingkan pendidikan.<sup>17</sup> Alasan tersebut membuat pemberantasan buta huruf sangat tidak mudah. Keseriusan pemerintah dalam penanganan buta huruf lebih diutamakan kepada menurunnya angka buta huruf pada penduduk 15 tahun keatas. Secara operasional program yang dijalankan pemerintah masa Orde Baru adalah penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan pemberantasan buta huruf . Program ini diutamakan pada pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A dan program Keaksaraan Fungsional.<sup>18</sup> Program – program ini dimaksudkan untuk memberantas kebutuhurufan dengan fokus kegiatan melalui diskusi, membaca, menulis dan berhitung dalam kebutuhan sehari-hari.

### 2. Konsep Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia. PLS berusia lebih tua dibandingkan dengan pendidikan sistem persekolahan. Pendidikan luar sekolah ini dikenal dengan istilah pendidikan nonformal. Uraian tersebut sangat jelas bahwa usaha

<sup>16</sup> W.P Napitupulu, 1976, *Kebijakan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan masyarakat untuk tingkat dasar*, (Jakarta), Hlm. 16

<sup>17</sup> Kompas 9 September 1971 “20 pct orang Dewasa Indonesia masih buta huruf” hlm 1

<sup>18</sup> Statistik pendidikan tahun 1980 “ Survei Sosial Ekonomi Nasional” hlm 71



pendidikan yang termasuk pendidikan luar sekolah harus disesuaikan dengan kebijakan pemberantasan buta huruf tersebut. Pendirian pendidikan Luar sekolah tidak lepas dari masyarakat yang tidak mampu untuk ikut dalam pendidikan formal.<sup>19</sup> Perkembangan dari pembahasan tersebut dibentuklah pendidikan luar sekolah yang berbasis pada program kejar paket A yang dilaksanakan pada awal tahun 1978 dan didirikan di desa-desa terpencil.<sup>20</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah suatu kegiatan proses belajar-mengajar di luar persekolahan untuk memperoleh pengetahuan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan.

### 3. Implementasi program kejar paket A

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, tanggal 24 Mei 1977 dengan salah satu program yang dilaksanakan yaitu program Kejar Paket A

Penduduk pada tahun akhir 1974 masa REPELITA II masih mengalami buta huruf. Penyebab dari banyaknya buta huruf yaitu dikarenakan adanya peristiwa buta huruf kembali. Orde Lama yang direncanakan membuat kebijakan pemberantasan buta huruf ternyata kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Presiden Soekarno mengalami pelengseran sebagai presiden membuat masyarakat menjadi terlantar dalam hal pendidikan. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Ada sekitar 71% penduduk Indonesia yang bermukim di desa dan sekitar 29% masyarakat yang bermukim di perkotaan. Banyaknya masyarakat yang masih mengalami buta huruf dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan tidak menjadi hal yang utama. Masyarakat masih menganggap bahwa bekerja untuk memperoleh uang adalah hal yang utama untuk mengembangkan dirinya. Faktor lain yang masih banyaknya masyarakat buta huruf adalah masalah keuangan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah formal sehingga banyak yang putus sekolah. Masyarakat usia 25 tahun keatas yang tidak memungkinkan untuk bersekolah formal juga dapat mengikuti program ini.

Tabel 2  
Anak usia 7-12 tahun yang buta huruf tahun 1976

Wilayah	Penduduk
Kota	4.483.041
Desa	6.768.431
Jumlah Keseluruhan	11..251.472

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Prosentase angka buta huruf usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{11.251.472}{20.092.181} \times 100\% = 55\%$$

2. Prosentase angka buta huruf di kota usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf di kota usia 7-12}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{4.483.041}{20.092.181} \times 100\% = 23\%$$

3. Prosentase angka buta huruf di desa usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf di desa usia 7-12}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{6.768.431}{20.092.181} \times 100\% = 22\%$$

Anak usia 7-12 tahun yang mengalami buta huruf tahun 1976 sekitar 11..251.472 tersebar di wilayah kota sebesar 4.483.041 sedangkan untuk wilayah desa sebesar 6.768.431. Penjelasan data tersebut menunjukkan bahwa angka buta huruf untuk anak usia 7-12 tahun di daerah pedesaan ternyata lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yaitu sebesar 23% dari prosentase jumlah buta huruf anak usia 7-12 tahun sebesar 55% sedangkan prosentase buta huruf di perkotaan sebesar 22% . Alasan tersebut sangat jelas perlu adanya program kejar paket di daerah pedesaan.

Angka putus sekolah dari tahun 1974-1976 dari mengalami penurunan karena program pendidikan luar sekolah sudah mulai dicanangkan diberbagai pelosok daerah meskipun belum dapat menguranginya secara signifikan. Angka putus sekolah untuk sekolah dasar lebih banyak dialami oleh siswa kelas 1 dan kelas 3 dimana alasan utamanya adalah masalah keuangan yang diderita keluarga.

Keadaan pendidikan akhir tahun 1979 lebih dapat dikurangi secara signifikan dan secara perlahan-lahan dapat membuat masyarakat banyak yang melek huruf. Berbagai program pemerintah seperti kebijakan pendidikan luar sekolah melalui program kejar paket

<sup>19</sup> Ary H Gunawan op.,cit Hlm 12

<sup>20</sup>Departemen pendidikan dan kebuayaan, loc.cit.

A di seluruh wilayah Indonesia. Program ini ternyata mampu membuat masyarakat usia sekolah yang tak dapat bersekolah dan juga masyarakat yang berusia 25 tahun keatas yang tidak memungkinkan mengikuti sekolah formal dapat melek huruf.

Tabel 3  
Jumlah penduduk tahun 1979 usia 7-12

Jumlah Penduduk	Kota	Desa
24.470.246	6.704.788	17.765.458

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 1979 yaitu sekitar 147.490.248 dengan perincian masyarakat yang tinggal di kota sebesar 39.504.480 atau sekitar 27% dan masyarakat pedesaan sebesar 107.985.768 atau sekitar 73%. Prosentase jumlah penduduk ini tersebar pada 26 provinsi yang ada di Indonesia

Tabel 4  
Anak usia 7-12 tahun yang buta huruf tahun 1979

Wilayah	Penduduk
Kota	6.897.231
Desa	10.374.749
Jumlah Keseluruhan	17.271.980

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Prosentase angka buta huruf usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\% = \frac{17.271.980}{24.470.246} \times 100\% = 51\%$$

2. Prosentase angka buta huruf di kota usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf di kota usia 7-12}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\% = \frac{6.897.231}{24.470.246} \times 100\% = 24\%$$

3. Prosentase angka buta huruf di desa usia 7-12 tahun

$$\frac{\text{jumlah buta huruf di desa usia 7-12}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\% = \frac{15.374.749}{24.470.246} \times 100\% = 27\%$$

Pada masa Orde Lama masyarakat Indonesia sudah melek huruf kemudian kembali mengalami buta huruf awal orde baru sehingga pemerintah mulai lebih efektif memberantas buta huruf melalui pendidikan luar sekolah.<sup>21</sup> Pelaksanakan program kejar paket A ini lebih maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat yang putus sekolah ataupun tidak bersekolah di desa-desa sudah mulai melek huruf.

Pendidikan Non Formal (Pendidikan Luar Sekolah) biasa disebut dengan PLS merupakan pendidikan masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal, seseorang tidak dapat me-nyelesaikan pendidikan di pendidikan formal, maka pendidikan luar sekolah dalam kurun waktu 14 – 45 tahun bisa bergabung ke pendidikan luar sekolah ini, adalah pendidikan yang ternyata lebih tua dari pendidikan formal ini di Indonesia.

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan data dan interpretasi yang telah dikembangkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kebijakan kejar paket A disebabkan oleh kondisi objektif kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih rendah. Banyaknya masyarakat Indonesia yang masih putus sekolah dan masih buta huruf membuat pendidikan menjadi bukan hal yang utama

Hasil dari implementasi dilihat dari kemampuan berbahasa Indonesia dan buta huruf . Masyarakat Indonesia cenderung tidak mengutamakan pendidikan dan lebih memilih bekerja sehingga program ini memberikan hasil yang baik meskipun tidak terlalu signifikan.

### 2. Saran

Penelitian tentang Pendidikan Luar Sekolah memang sudah banyak yang melakukan tetapi cenderung kepada di daerah-daerah kota besar. Belum banyak yang mengambil di daerah-daerah yang terpencil yang masyarakatnya memiliki pendidikan yang kurang memadai. Seharusnya banyak para peneliti yang mengambil daerah-daerah pedesaan yang masyarakatnya perlu dididik dan dibina. Sehingga penelitian itu dapat menarik dan menjadi kajian penulisan dari pembaca

Pemberantasan buta huruf seperti yang dilakukan pemerintah melalui program kejar paket A dan program wajib belajar sembilan tahun harus diiringi dengan beberapa kebijakan yang mendukung, diantaranya melalui sistem pendidikan murah bagi rakyat kurang mampu, pemberdayaan budaya membaca dan menulis, serta sosialisasi arti pentingnya pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah pelosok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Surat instruksi presiden no 15 tahun 1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan
- Surat keputusan Presiden RI yaitu Soeharto nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan
- Surat Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat kepada Menteri Dalam Negeripada tanggal 25 April 1975

Statistik Indonesia tahun 1976-1980. Jakarta : Badan Pusat Statistik Indonesia

<sup>21</sup> Kompas 9 september 1971 “ 20 pct orang Indonesia masih buta huruf”Hlm 1

Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberantasan Buta huruf tahun 1971 dan 1975

Koran Jawa Pos 3 Maret 1979 hal 3 “ 30 juta orang Indonesia masih buta huruf”

Koran Kompas 9 September 1971 hal 1 “20 pCt orang Dewasa Indonesia buta huruf”

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. “Studi Proyeksi Pendidikan REPELITA II”. Jakarta: DEPDIKBUD

Gunawan : Ary H. 1986. “kebijakan-kebijakan pendidikan”. Jakarta : Rineka Cipta

Sanapiah, Faisal. 1981. *Pendidikan Luar Sekolah* . Surabaya: CV. Usaha Nasional.

W. P, Napitupulu. 1976. *Kebijakan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan masyarakat untuk tingkat dasar*. Jakarta.

Yusuf, Maftuchah, 1985. “ *Program Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional*”. Jakarta : FPS-IKIP

